

MEMBANGUN KEPERCAYAAN : PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH

Baiq Djwita Ayu Susila¹, Siti Shaliha², Hayat³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

shalihasiti2@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *Public administration ethics plays an important role in building public trust in government agencies. The application of values such as transparency, accountability, integrity and professionalism increases the public's positive perception of government governance. Public trust is an important asset for the government because it determines the legitimacy and participation of citizens in development policies and programs. Transparency allows the public to monitor government performance, while accountability ensures that every decision can be accounted for. Leadership with integrity is also key in encouraging an ethical culture in the bureaucracy, which has a direct impact on the government's reputation. However, various challenges such as a rigid*

bureaucratic culture and political interference can hinder the implementation of ethics. In addition, corruption and abuse of authority risk undermining public trust and reducing government legitimacy. Public participation in monitoring and decision making can strengthen the application of ethics and encourage active citizen involvement. By implementing good ethics, the government not only strengthens relations with society but also increases the effectiveness of policies. Ethical literacy among officials and the public is very necessary so that these principles can be internalized and applied in everyday life. A harmonious relationship between the government and the public will be realized through ethical governance, thereby creating an inclusive, stable and sustainable government.

Keywords: *Public Administration Ethics, Public Trust, Transparency, Accountability, Integrity, Governance*

Abstrak. Etika administrasi publik berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Penerapan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik adalah aset penting bagi pemerintah karena menentukan legitimasi dan partisipasi warga dalam kebijakan dan program pembangunan. Transparansi memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan berintegritas juga menjadi kunci dalam mendorong budaya etis di birokrasi, yang berdampak langsung pada reputasi pemerintah. Namun, berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang kaku dan intervensi politik dapat menghambat penerapan etika. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang berisiko merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan legitimasi pemerintah. Partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat penerapan etika dan mendorong keterlibatan aktif warga. Dengan penerapan etika yang baik, pemerintah tidak hanya memperkuat hubungan dengan masyarakat tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan. Literasi etika di kalangan pejabat dan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip-prinsip ini

dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan publik akan terwujud melalui tata kelola yang beretika, sehingga menciptakan pemerintahan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik, Kepercayaan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Integritas, Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Etika administrasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pelayanan publik, etika administrasi tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan. Pemerintah dan instansi terkait dituntut untuk mengedepankan etika ini dalam setiap kebijakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penerapan etika administrasi publik menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan ini penting, karena menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Namun, berbagai permasalahan terkait tata kelola administrasi publik masih sering muncul di Indonesia. Kasus-kasus korupsi, ketidaktransparanan dalam pengambilan kebijakan, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik masih menjadi sorotan. Ketika etika dalam administrasi publik tidak dijalankan dengan baik, dampaknya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Kepercayaan publik yang rendah dapat memicu krisis legitimasi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik administrasinya, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dari segi etis.

Penelitian tentang membangun kepercayaan peran etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik pada instansi pemerintah penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat. Etika administrasi yang baik bukan hanya memperbaiki kinerja internal instansi, tetapi juga membangun reputasi yang positif di mata publik. Pemerintah yang etis cenderung mendapatkan dukungan dan legitimasi yang lebih tinggi dari masyarakat, karena warga merasa diperlakukan secara adil dan memperoleh layanan sesuai harapan. Sebaliknya, jika instansi publik tidak mematuhi prinsip-prinsip etika, akan muncul ketidakpuasan, yang dapat berdampak pada protes sosial atau penurunan kepatuhan warga terhadap kebijakan yang diterapkan. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan etika administrasi publik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Dengan mengetahui keterkaitan antara kedua aspek ini, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam memperkuat tata kelola dan hubungan dengan masyarakat. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih etis dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini antara lain: Sejauh mana penerapan etika administrasi publik berperan dalam membangun kepercayaan publik? Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan etika di lingkungan instansi pemerintah? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap

praktik administrasi publik yang sudah berjalan, dan sejauh mana etika mempengaruhi kepercayaan mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil kajian ini dapat menambah wawasan akademis terkait hubungan antara etika dan kepercayaan dalam konteks administrasi publik. Temuan penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai tata kelola pemerintahan yang berfokus pada aspek etika. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga publik untuk memperbaiki tata kelola administrasi mereka. Dengan penerapan etika yang lebih baik, diharapkan muncul peningkatan kepercayaan publik yang akan berdampak positif pada efektivitas kebijakan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, manfaat bagi masyarakat adalah mereka dapat memperoleh layanan publik yang lebih baik dan adil. Kepercayaan publik yang meningkat juga akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya. Di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, penerapan etika administrasi menjadi jalan yang efektif untuk membangun kredibilitas pemerintah. Melalui etika yang kuat, instansi pemerintah tidak hanya melayani masyarakat dengan baik, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam jangka panjang, peningkatan kepercayaan publik akan berdampak pada peningkatan stabilitas politik dan sosial. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kepatuhan terhadap kebijakan akan lebih mudah dicapai jika mereka merasa bahwa pemerintah bersikap etis dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penekanan pada etika administrasi bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah kebutuhan mendasar dalam memperkuat pemerintahan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Etika administrasi publik dan kepercayaan publik merupakan dua elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai literatur menekankan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik sangat menentukan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika administrasi publik merujuk pada nilai-nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sementara itu, kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak secara adil, jujur, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Beberapa teori mendasari pentingnya etika administrasi dalam membangun kepercayaan publik. Teori good governance menekankan bahwa tata kelola yang baik hanya dapat tercapai melalui prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Etika administrasi berperan dalam memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika pemerintah konsisten menjalankan prinsip-prinsip ini, masyarakat merasa dihargai dan yakin bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Literatur juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga integritas dan menghindari korupsi. Menurut penelitian Rumambi, (2014), korupsi dalam administrasi publik tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan legitimasi pemerintah. Masyarakat yang melihat pemerintah terlibat dalam praktik tidak etis cenderung kehilangan rasa percaya, yang mengakibatkan menurunnya partisipasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan. Oleh karena itu, penerapan etika menjadi mekanisme penting untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas lembaga pemerintah.

Teori social trust menyoroti bahwa kepercayaan publik tidak hanya terbentuk melalui kinerja teknis pemerintah, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai moral yang dipegang oleh lembaga publik. Bakhrur Rokhman et al (2023) berpendapat bahwa masyarakat cenderung mempercayai pemerintah jika mereka melihat adanya komitmen etis dalam pengambilan keputusan dan pemberian layanan publik. Selain itu, kepercayaan publik dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah. Layanan publik yang transparan dan adil menciptakan persepsi positif yang memperkuat rasa percaya, sementara pengalaman negatif seperti diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dapat memperlemah kepercayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Etika dalam konteks ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga penerapan prinsip moral seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, kejujuran, dan keadilan. Penerapan etika yang baik dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat, sementara pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan ini merupakan aset penting bagi keberhasilan sebuah pemerintahan, karena menjadi dasar legitimasi dan partisipasi warga dalam pembangunan. Dalam administrasi publik, etika diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pelayanan publik yang berlandaskan etika mampu menciptakan rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika etika diabaikan, muncul masalah seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidakadilan dalam layanan, yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan ini dapat memicu penurunan legitimasi pemerintah dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Penerapan etika administrasi publik dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui beberapa cara. Pertama, prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Dengan keterbukaan informasi, warga dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah, sehingga muncul rasa percaya bahwa keputusan yang diambil pemerintah bersifat adil dan tidak merugikan. Kedua, akuntabilitas memperkuat rasa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ketika instansi pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan siap menerima kritik serta

masukannya, masyarakat akan lebih percaya pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki diri dan melayani dengan lebih baik.

Di sisi lain, integritas pejabat publik juga menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik. Pejabat yang jujur dan konsisten dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran etika seperti korupsi atau konflik kepentingan, masyarakat cenderung kehilangan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Dampak buruk dari pelanggaran etika ini tidak hanya menurunkan citra institusi, tetapi juga melemahkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan publik. Namun, meskipun etika administrasi publik memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama dalam penerapan etika sering kali datang dari budaya birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, pegawai publik mungkin mengalami dilema etis ketika dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau tekanan politik bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidakjelasan regulasi terkait etika juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan setiap pegawai dan pejabat publik bertindak secara etis.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi, potensi penyimpangan dalam administrasi publik dapat diminimalisasi. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme pengaduan yang efektif agar warga dapat melaporkan pelanggaran etika dengan mudah dan tanpa takut mengalami intimidasi. Dengan adanya sistem pengaduan yang transparan, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah serius dalam menegakkan prinsip-prinsip etika. Pelatihan dan pendidikan etika bagi pegawai publik juga penting untuk memastikan penerapan etika administrasi yang konsisten. Pegawai yang memahami nilai-nilai etis akan lebih siap menghadapi tantangan dan dilema moral dalam pekerjaannya. Program pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis tentang etika, tetapi juga menekankan pada pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar moral. Dengan pembekalan yang memadai, setiap individu di dalam organisasi akan lebih mampu menjadikan etika sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas juga sangat berperan dalam mendorong penerapan etika di lingkungan instansi pemerintah. Pemimpin yang menjadi teladan dalam berperilaku etis akan menginspirasi pegawai di bawahnya untuk melakukan hal yang sama. Ketika etika menjadi bagian dari budaya organisasi, maka setiap individu dalam instansi akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga reputasi dan integritas lembaga. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Penguatan kepercayaan publik melalui penerapan etika administrasi publik juga akan berdampak positif pada efektivitas kebijakan. Masyarakat yang percaya pada pemerintah cenderung lebih patuh terhadap kebijakan dan program-program yang diterapkan. Selain itu, tingkat partisipasi warga dalam pembangunan akan meningkat, karena mereka merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat

ini sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika kepercayaan publik terus menurun akibat pelanggaran etika, pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Krisis kepercayaan dapat memicu ketidakpuasan sosial dan protes, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial. Selain itu, masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah cenderung lebih sulit diajak bekerja sama dalam mendukung program-program pembangunan. Oleh karena itu, penerapan etika administrasi publik bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga strategi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.

Pengaruh etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik sangat signifikan. Etika yang diterapkan dengan konsisten mampu memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga. Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola administrasinya. Dengan demikian, etika bukan hanya menjadi norma yang diikuti secara formal, tetapi juga menjadi budaya yang melekat dalam setiap aspek pelayanan publik. Kepercayaan yang terbangun dari penerapan etika administrasi publik akan menjadi fondasi bagi tercapainya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan etika administrasi publik yang konsisten juga berkontribusi pada peningkatan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional. Pemerintah yang dikenal etis dan transparan akan lebih mudah mendapatkan dukungan baik dari warga maupun mitra internasional, seperti investor asing atau lembaga donor. Hal ini dapat membuka peluang lebih besar dalam kerja sama pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap tidak beretika, investor dan mitra internasional mungkin enggan bekerja sama karena khawatir terhadap risiko korupsi atau ketidakpastian hukum. Dalam konteks globalisasi, etika menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di arena internasional. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme akuntabilitas publik melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran harus konsisten dan tidak tebang pilih agar masyarakat melihat adanya keadilan. Tanpa penegakan yang jelas, prinsip etika hanya akan menjadi sekadar wacana tanpa implementasi nyata. Reformasi birokrasi yang mencakup peningkatan pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan diambil dengan mengedepankan kepentingan publik.

Di samping itu, partisipasi publik yang aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat penerapan etika administrasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Proses partisipatif ini akan memberikan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) bagi masyarakat terhadap program-program pemerintah. Ketika warga merasa dilibatkan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah dan siap mendukung kebijakan yang diterapkan, bahkan ketika kebijakan tersebut membutuhkan pengorbanan dari pihak masyarakat. Etika administrasi publik juga berperan penting dalam

merespons situasi krisis, seperti pandemi atau bencana alam. Dalam kondisi krisis, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan darurat dan bekerja sama dalam proses penanggulangan bencana. Pemerintah yang berperilaku etis dan transparan dalam menangani krisis akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah dinilai tidak transparan atau terlibat dalam praktik yang tidak etis, seperti penyelewengan dana bantuan, maka kepercayaan publik akan runtuh dan berdampak pada ketidakpatuhan warga.

Pada akhirnya, etika administrasi publik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat. Pemerintahan yang etis tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga, dan pemerintah harus selalu berupaya untuk mempertahankannya melalui praktik administrasi yang etis, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan etika yang baik, instansi pemerintah tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan legitimasi, tetapi juga mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika prinsip-prinsip etika ini diterapkan secara konsisten, masyarakat merasa dihargai dan yakin bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan bersama, sehingga memperkuat legitimasi dan mendorong partisipasi publik dalam berbagai program dan kebijakan.

Transparansi memungkinkan masyarakat memantau proses dan hasil dari setiap kebijakan yang diambil, mengurangi ketidakpastian, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat, yang memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas menjadi contoh yang memotivasi pegawai pemerintah untuk bekerja secara etis dan profesional, menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih sehat dan produktif.

Namun, berbagai tantangan muncul dalam penerapan etika administrasi publik. Budaya birokrasi yang kaku dan intervensi politik sering kali menghambat proses reformasi birokrasi yang berorientasi pada etika. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga dapat merusak kepercayaan publik, yang berdampak negatif pada efektivitas kebijakan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor etis. Kepercayaan publik adalah aset penting bagi pemerintah, yang menentukan keberhasilan program dan stabilitas politik. Pemerintah yang beretika akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat, serta meningkatkan reputasi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan literasi etika yang baik di kalangan pejabat dan masyarakat, prinsip-prinsip etika dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong terciptanya hubungan

yang harmonis antara pemerintah dan warga negara. Tata kelola yang berlandaskan etika memungkinkan pemerintah mewujudkan pemerintahan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A., Bangun, R., Indillah, M. R. M., Trenggana, A. F. M., Sholihah, D. R., Ariyanti, M., Widiati, E., Irawan, P., Ratih, S. D., & Ismail, R. S. (2023). *Manajemen Pemasaran*.
- Bakhrur Rokhman, Denok Kurniasih, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian e-ISSN : 2809-8862 Good Governance Di Indonesia. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(7), 915–924. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3950>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1–11.
- Musri, R. A. M. (2022). *Etika Administrasi Publik Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*. 25.
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi perspektif HAN. *Lex et Societatis*, 2(7), 106–114.
- Sunan, I., & Surabaya, A. (2013). Jurnal ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Holilah. *Review Politik*, 03(02), 232–255.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922>